

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada dasarnya perekonomian adalah suatu proses perubahan yang dilakukan secara terencana melalui proses dan tahapan – tahapan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup/kesejahteraan masyarakat. Konsep ini sejalan dengan tujuan nasional yaitu untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil, makmur dan merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila.

Alokasi Dana Desa (ADD) bersumber dari APBD Kabupaten yang dialokasikan untuk tujuan membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat (Permendagri No. 133 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 9). Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten setelah dikurangi dana alokasi khusus (Permendagri No. 133 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 10).

Dalam Penetapan penerimaan bantuan dana desa harus dilakukan secara tepat dan akurat. Pengelolaan data dalam pemilihan warga yang berhak mendapatkan bantuan pada umumnya masih menggunakan sistem manual sehingga terjadi kekeliruan. Permasalahan yang terjadi adalah bantuan yang dilaksanakan ini kurang efisien dalam penyalurannya, ada yang kurang mampu tidak dapat bantuan dan sebaliknya, sehingga menimbulkan efek keributan yang membuat warga yang merasa dirinya pantas mendapat bantuan melakukan protes ke Pemerintah Desa/Nagari. Dari permasalahan yang terjadi perlu adanya sistem

penunjang keputusan yang berguna untuk menentukan wargamana saja yang layak atau yang berhak dalam mendapatkan bantuan tersebut.

Sistem Penunjang Keputusan (SPK) merupakan pengembangan lebih lanjut dari sistem informasi manajemen terkomputerisasi yang dirancang sedemikian rupa sehingga bersifat interaktif dengan penggunanya. Sifat interaktif ini dimaksudkan untuk memudahkan integrasi antara berbagai komponen dalam proses pengambilan keputusan seperti prosedur, kebijakan, teknik analisis, serta pengalaman dan wawasan manajerial guna membentuk suatu kerangka keputusan yang bersifat fleksibel. (Sari, 2018: 1-2).

Pada dasarnya sistem penunjang keputusan dibangun untuk menyediakan informasi, membimbing, serta mengarahkan pengguna informasi untuk dapat mengambil keputusan dengan lebih baik dan tentunya dibutuhkan dukungan dari sebuah metode. Terdapat beberapa metode SPK yang dapat digunakan, yaitu Simple Additive Weighting (SAW), *Weighted product* (WP), Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS), Profile Matching, Analytic Hierarchy Process (AHP) (Oktavia, 2018).

Metode *Weighted Product* adalah salah satu analisis pengambilan keputusan multi-kriteria dengan menentukan faktor kriteria sebagai manfaat dengan mencari hasil perkalian nilai kriteria alternatif terhadap bobot kriteria. Metode *Weighted product* (WP) merupakan metode penyelesaian untuk menyelesaikan masalah Multi Attribute Decision Making (MADM) (Niza, 2019). Menggunakan metode WP ini lebih efisien karena dengan penentuan nilai bobot untuk setiap atribut dan dilanjutkan dengan proses perankingan yang menentukan anggota terbaik sesuai kriteria (Muslihudin and Rahayu, 2018).

Dengan pertimbangan tersebut dan pribadi penulis yang ingin menerapkan pengetahuan yang telah diperoleh maka penulis tertarik untuk membuat suatu sistem informasi yang berjudul ” **PERANCANGAN SISTEM PENUNJANG KEPUTUSAN UNTUK MENENTUKAN PENERIMAAN DANA DESA DI NAGARI BALIMBING KECAMATAN RAMBATAN KABUPATEN TANAH DATAR DENGAN MENGGUNAKAN METODE WEIGHTED PRODUCT**”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis dapat menyimpulkan permasalahan yang ada pada kantor wali Nagari Balimbing yaitunya tentang penerimaan dana desa untuk dijadikan pembahasan dalam laporan yaitu :

1. Bagaimana cara menentukan calon penerima dana desa secara akurat dan efisien agar tidak terjadi permasalahan atau kekeliruan dalam penyaluran dana tersebut?
2. Untuk menentukan calon penerima dana desa secara tepat dan akurat metode apa yang digunakan agar proses penyaluran dana desa dapat dilakukan secara efisien?
3. Bagaimana cara mempermudah pihak Pemerintah Desa/Nagari dalam menentukan data calon penerima dana desa?

1.3. Batasan Masalah

Supaya pembahasan dalam laporan tidak terlalu luas, penulis perlu

memberikan batasan masalah, maka dengan itu penulis membuat batasan masalah sebagai berikut :

1. Objek penelitian berfokus pada Nagari Balimbing Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar
2. Sistem Penunjang Keputusan yang dibangun menggunakan Bahasa Pemrograman PHP dan Database MySQL dengan menggunakan metode Weighted Product.

1.4. Hipotesa

Berdasarkan Rumusan Masalah yang telah diuraikan maka didapatkan beberapa hipotesa sebagai jawaban sementara permasalahan yang ada yaitu :

1. Diharapkan dalam penelitian ini dapat merancang sistem penunjang keputusan penerimaan dana Desa dengan menggunakan metode Weighted Product untuk menentukan penerima dana Desa secara tepat, akurat dan efisien .
2. Dengan menggunakan metode Weighted Product dalam proses pengambilan keputusan penerimaan dana desa dapat dilakukan dengan tepat dan efisien.
3. Diharapkan dengan adanya perancangan sistem dengan menggunakan Bahasa Pemrograman dan Database MYSQL dapat mempermudah pihak Pemerintahan Nagari/Desa dan dapat menemukan rekomendasi penerima dana Desa yang tepat dan akurat.

1.5. Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dalam perancangan Sistem Penunjang Keputusan pada Pemerintah Nagari Balimbing adalah sebagai berikut :

1. Merancang Sistem Penunjang Keputusan penerimaan dana desa dengan menggunakan Bahasa Pemrograman PHP dan Database MySQL.
2. Menerapkan metode Weighted Product untuk menentukan penerima dana desa agar lebih efisien dan tepat sasaran.

1.6. Manfaat Penelitian

Manfaat yang di harapkan dalam Perancangan Sistem Penunjang Keputusan pada Pemerintah Nagari Balimbing ialah sebagai berikut :

1. Bagi Mahasiswa
 - a. Menambah pengalaman dan wawasan penulis dalam membangun sistem informasi.
 - b. Sebagai sarana bagi penulis dalam mengembangkan wawasan di bidang Ilmu Komputer.
 - c. Sebagai acuan bagi peneliti dalam mengembangkan sistem yang lebih baik.
2. Bagi Kampus
 - a. Sebagai bahan untuk menambah referensi di Perpustakaan Universitas Putra Indonesia “YPTK” Padang.
 - b. Sebagai alat ukur untuk menilai pemahaman mahasiswa dalam melakukan penelitian.

3. Bagi Pemerintah Desa/Nagari

- a. Untuk mempermudah pemerintah Desa/Nagari dalam menetapkan penerima bantuan desa ini secara tepat dan akurat
- b. Untuk menghindari kesalahan dalam penerimaan dana desa.
- c. Menghasilkan keputusan yang objektif.
- d. Penulis dapat menambah ilmu pengetahuan khusus dalam pembuatan Sistem Informasi.

1.7. Tinjauan Umum Pemerintah Nagari Balimbing

Nagari Balimbing sangat membutuhkan Sistem Penunjang Keputusan (SPK) untuk mempermudah pihak Pemerintah Nagari/Desa dalam menentukan masyarakat yang layak untuk mendapatkan bantuan dana desa, dengan adanya Sistem Penunjang Keputusan (SPK) tersebut Pemerintah Nagari/Desa dapat menentukan masyarakat yang layak mendapatkan dana tersebut secara tepat, akurat dan efisien.

1.7.1. Sejarah Umum Pemerintah Nagari Balimbing

Nagari Balimbing terdapat di Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar yang berbatasan dengan Nagari Rambatan di sebelah utara, Nagari Tigo Koto di sebelah Barat, Nagari Simawang dan Kabupaten Solok di sebelah selatan dan Kecamatan Tanjung Emas di sebelah timur (profil Nagari Balimbing). Nagari Balimbing terletak di dataran tinggi sehingga suhu daerah ini relatif rendah, dimana ketinggiannya berada di 578 mdpl. Nagari Balimbing memiliki bentang alam yang unik yaitu dikelilingi oleh perbukitan. Jarak antara Nagari Balimbing dengan pusat kecamatan adalah 7 km sedangkan ke pusat kabupaten 19 km.

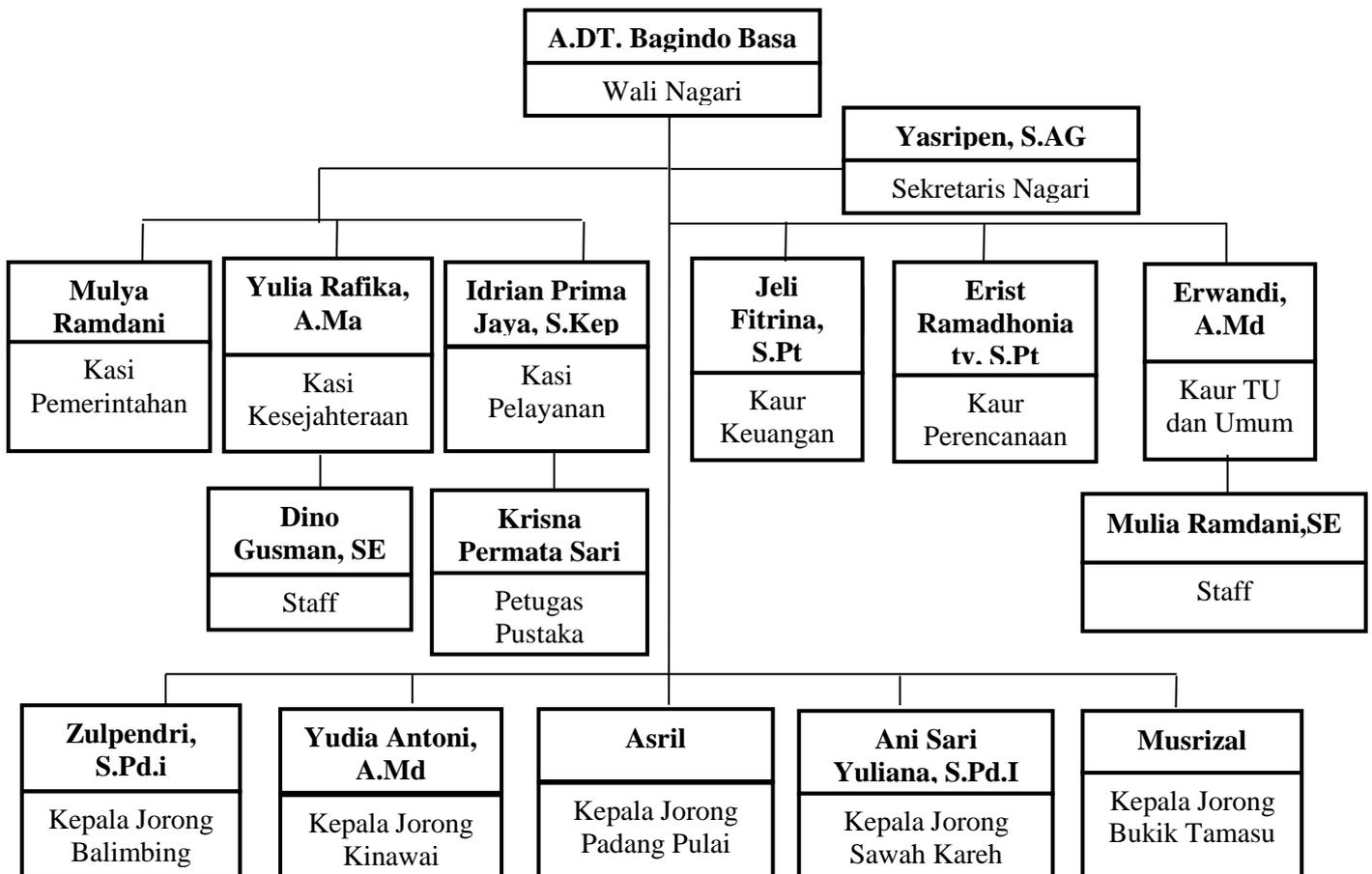
Luas Nagari Balimbing berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten

Tanah Datar tahun 2017 meliputi 29,44 km² dengan rincian sebagai berikut:

1. Jorong Balimbing 6,27km²
2. Jorong Kinawai 7,47km²
3. Jorong Sawah Kareh 5,78km²
4. Jorong Padang Pulai 5,37km²
5. Jorong Bukit Tamasu 4,61km²

Dari data diatas dapat dilihat bahwa Jorong Kinawai merupakan wilayah jorong terluas di Nagari Balimbing. Pusat Pemerintahan Nagari Balimbing juga terletak di Jorong Kinawai.

1.7.2 Struktur Pemerintah Nagari Balimbing



Gambar 1. 1 Struktur Pemerintah Nagari Balimbing

1.7.3. Tugas dan Wewenang

Adapun tugas adari masing – masing bagian struktur Perintah Nagari Balimbing secara umum adalah sebagai berikut :

1. Wali Nagari, Bertanggung jawab atas semua kegiatan yang ada pada Nagari tersebut
2. Sekretaris, Bertugas memverifikasi semua kegiatan yang ada pada Nagari tersebut
3. Kaur/Kasi, Memiliki tanggung jawab atas atas semua kegiatan kaur dan kasi
4. Staff, Bertugas membantu Kaur/Kasi di Nagari tersebut
5. Petugas Pustaka, Bertugas mengelola perpustakaan Nagari
6. Kepala Jorong, Bertugas dalam melayani masyarakatnya masing – masing dan bertanggung jawab langsung ke Wali Nagari